

EDISI SELASA / 31 Maret 2020

HARIAN UNTUK UMUM
TERBIT SENIN - JUMAT
12 HalamanE-mail redaksi@lenteratoday.com
Redaksi 031-87854491
Iklan 031-87854491
Kantor Redaksi
Jl. Rungkut Asri Utara VI no 26
Surabaya

LENTERA

Inspirasi Perubahan **TODAY**

#kerendirumah

Aku menyukai orang-orang yang membuatku tertawa. Itu menyembuhkan banyak rasa sakit. Itu mungkin hal yang paling penting di dalam diri seseorang.

Audrey Hepburn, Aktris



Presiden Jokowi resmi memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan Karantina Kesehatan, menyikapi korban positif corona yang semakin melonjak. Bila langkah ini tak mempan, maka Darurat Sipil akan diambil sebagai jurus terakhir. Pro-kontra pun langsung mengalir meminta pemerintah tak gegabah, Indonesia dinilai cukup menjalankan Darurat Kesehatan Nasional saja.

(Baca, Hal 11)

PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR

(UU Nomor 6/2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan)
Pasal 59

- (1) Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan bagian dari respons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
- (2) Pembatasan Sosial Berskala Besar bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu.
- (3) Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. peliburan sekolah dan tempat kerja;
 - b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
 - c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
- (4) Penyelenggaraan Pembatasan Sosial Berskala Besar berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

DARURAT SIPIL

(Perppu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya)

- (1) Penguasa Darurat Sipil berhak mengadakan peraturan-peraturan untuk membatasi pertunjukan-pertunjukan, percetakan, penerbitan, pengumuman, penyampaian, penyimpanan, penyebaran, perdagangan dan penempelan tulisan-tulisan berupa apapun juga, lukisan-lukisan, klise-klise dan gambar-gambar.
- (2) Penguasa Darurat Sipil berhak atau dapat menyuruh atas namanya pejabat-pejabat polisi atau pejabat-pejabat pengusut lainnya atau menggeledah tiap-tiap tempat, sekalipun bertentangan dengan kehendak yang mempunyai atau yang menempatnya, dengan menunjukkan surat perintah umum

atau surat perintah istimewa.

- (3) Penguasa Darurat Sipil berhak akan dapat menyuruh memeriksa dan mensita semua barang yang diduga atau akan dipakai untuk mengganggu keamanan serta membatasi atau melarang pemakaian barang itu.
- (4) Penguasa Darurat Sipil berhak mengambil atau memakai barang-barang dinas umum.
- (5) Penguasa Darurat Sipil berhak memeriksa badan dan pakaian tiap-tiap orang yang dicurigai serta menyuruh memeriksanya oleh pejabat-pejabat Polisi atau pejabat-pejabat pengusut lain
- (6) Penguasa Darurat Sipil berhak membatasi orang berada di luar rumah.
- (7) Penguasa Darurat Sipil berhak:
 - a. mengetahui semua berita-berita serta percakapan-percakapan

yang dipercakapkan kepada kantor telepon atau kantor radio, pun melarang atau memutuskan pengiriman berita-berita atau percakapan-percakapan dengan perantaraan telepon atau radio.

- b. membatasi atau melarang pemakaian kode-kode, tulisan rahasia, percetakan rahasia, tulisan steno, gambar-gambar, tanda-tanda, juga pemakaian bahasa-bahasa lain daripada bahasa Indonesia;
- c. menetapkan peraturan-peraturan yang membatasi atau melarang pemakaian alat-alat telekomunikasi seperti telepon, tilgrap, pemancar radio dan alat-alat lainnya yang ada hubungannya dengan penyiaran radio dan yang dapat dipakai untuk mencapai rakyat banyak, pun juga mensita atau menghancurkan perlengkapan-perengkapan tersebut.

PERKEMBANGAN VIRUS CORONA

	Kasus Positif	Meninggal Dunia	Sembuh
INDONESIA	1.414	122	75
SELURUH DUNIA	724.436	34.009	152.065

Update : 30 Maret 2020 Pukul 15.00 WIB
Source : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Johns Hopkins



Surabaya- Makin meningkatkannya jumlah pasien terinfeksi corona mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Jawa Timur mengkaji rencana penerapan karantina wilayah atau pembatasan akses keluar-masuk Surabaya. Ada sekitar 19 pintu masuk yang akan dijaga ketat di Kota Pahlawan ini.

"Terkait rencana karantina wilayah ini sedang dikaji. Ini masih akan dirapatkan secara teknis dengan mengundang beberapa jajaran samping yang terkait dengan hal tersebut," kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajat di Surabaya, Senin (30/3). Ia mengatakan rencana kebijakan itu kini tengah dikaji bersama jajaran terkait, seperti TNI-Polri dan Dinas Kesehatan.

Irvan mengatakan, Kota Surabaya memiliki 19 jalur akses masuk. Di 19 titik

SURABAYA KAJI KARANTINA WILAYAH, 19 PINTU MASUK BAKAL DIJAGA KETAT

tersebut nanti akan diberlakukan screening ketat bagi kendaraan dan masyarakat, baik yang akan keluar ataupun masuk.

Kebijakan itu, kata Irvan, dikaji setelah Pemkot Surabaya melakukan pendalaman dan ditemukan indikasi bahwa penular virus corona di Surabaya, adalah warga yang baru saja berkunjung dari luar daerah.

"Memang setelah dilakukan pendalaman, penyebab beberapa pasien yang positif Covid-19 di Surabaya, ternyata banyak dari warga Surabaya yang dari luar kota," katanya.

Namun saat ditanya seberapa besar rasio penularan warga yang usai berkunjung keluar daerah tersebut, Irvan mengaku dirinya tak bisa mengungkapkan hal itu. "Ada dua sebenarnya, memang kami tidak bisa buka secara vulgar tapi memang, yang kami dapatkan informasinya seperti itu. Jadi covid-19 ini bukan murni dari Surabaya, tapi memang dibawa dari luar," ujarnya.

Maka sebagai bentuk upaya untuk menekan potensi penularan dan

memutus mata rantai infeksi virus corona di Surabaya, Pemkot Surabaya pun tengah mengkaji kebijakan ini. (ard)



Stadion Gelora Bung Tomo (Pakal), Terminal Tambak Osowilangun (Benowo), Dupak Rukun (Asemrowo), Kodikal (Pabean), Mayjen rumah pompa (Dukuh Pakis), Gunungsari (Jambangan), Kelurahan Kedurus (Karang Pilang), Masjid Agung (Kec. Gayungan) dan Jeruk (Lakarsantri)

Driyorejo, Benowo Terminal (Pakal), Tol Simo (Sukomanunggal), Mal City of Tomorrow (Dishub), MERR (Gunung Anyar), Suramadu (K), Rungkut Menanggal (Gunung Anyar), Wiguna Gunung Anyar Tambak (Gunung Anyar), Margomulyo (Tandes) dan Pondok Chandra (Gunung Anyar).



Sekretaris MUI Jatim, Ainal Yaqin (kiri) dan Wagub Jatim, Emil Dardak

Surabaya - Jumlah kasus corona di Jawa Timur masih tinggi. Pemprov pun telah memberi imbauan larangan mudik. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim setuju dengan imbauan itu tapi dengan kebijakan yang membantu rakyat.

"Mudik memang hal dilematis, banyak pekerja-pekerja informal di Jakarta yang ingin mudik, karena mereka sudah tidak bisa bekerja lagi. Kalau pemerintah mengimbau larangan mudik atau di rumah saja bagi perantau harus ada solusi juga kepada mereka," kata Sekretaris MUI Jatim, Ainal Yaqin, Senin (30/3).

Untuk diketahui, data Laporan Media Harian Covid-19 per 30 Maret 2020 yang dikeluarkan Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 menunjukkan ada penambahan jumlah pasien positif corona di Jawa Timur. Jika pada hari sebelumnya, jumlahnya 90 orang, kini ada penambahan satu sehingga jumlahnya menjadi 91 kasus.

Sementara untuk jumlah kasus

MUI JATIM SETUJU LARANGAN MUDIK, ASAL ADA JAMINAN BAGI PERANTAU

sembuh dari corona bertambah cukup banyak yakni mencapai lima orang. Jika sebelumnya berjumlah 11, kini menjadi 16 orang. Sedangkan untuk pasien meninggal dunia di Jatim juga mengalami kenaikan. Menurut data hari ini, ada seorang pasien positif corona meninggal dunia sehingga total menjadi delapan orang.

Ainal menyebut bila pemerintah hanya mengimbau larangan mudik tanpa memberi solusi yang jelas, akan ada banyak warga Jatim yang kelaparan di daerah rantauan. Dia ingin pemerintah mengeluarkan kebijakan/bantuan untuk meringankan beban para perantau.

"Mereka kalau tetap tinggal di Jakarta bisa tidak bisa hidup, kelaparan. MUI Jatim berharap kepada pemerintah mencari solusi. Mereka tidak perlu mudik tapi kehidupannya diurus. Ini rekomendasi MUI Jatim," tegasnya.

Ainal menambahkan pada dasarnya MUI Jatim setuju bila mudik tahun ini untuk ditahan dulu agar penyebaran virus corona tidak semakin membesar. "Kalau mudik ke daerahnya, penyebaran virus bisa semakin tidak terkendali. Karena itu, tidak mudik, tapi solusi jelas. Kewajiban pemerintah untuk melindungi rakyatnya,"

terangnya.

Bukan Lockdown, Tapi Pengetatan

Sementara itu, sebuah foto surat 'Undangan Rakor' berkop Pemerintah Provinsi Jawa Timur berseliweran di grup-grup WhatsApp sejak Sabtu, 28 Maret 2020. Isi surat tertulis agenda rakor yang bikin heboh: wacana lockdown kawasan Madura.

Secepat Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meluruskan bahwa yang dihasilkan dari rapat ialah pengetatan pintu masuk ke Pulau Madura. Bukan lockdown. Ia mengatakan, pintu-pintu masuk ke Pulau Madura akan diperketat. Selain itu, tenda drive thru penyemprotan disinfektan akan didirikan di pintu masuk ke Pulau Garam, baik jalur darat maupun laut.

"Tidak ada lockdown. Tapi kita melakukan proteksi dengan berbagai pemeriksaan berlapis. Saya menyampaikan ini pemeriksaan dan pencegahan berlapis," katanya.

Khofifah mengatakan, kebijakan lockdown hanya diputuskan oleh pemerintah pusat. Menurutnya, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan itu. "Kalau lockdown tidak ada orang keluar rumah. Kalau ada makanan, disiapkan di masing-masing depan rumah," ujarnya. (ist)

PUAN: **TAK ADA KUNKER**, DPR FOKUS PENANGANAN CORONA

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani memutuskan meniadakan kunjungan kerja (kunker) anggota dewan ke luar negeri maupun dalam negeri. Wakil rakyat sepenuhnya diminta berkonsentrasi dalam penanganan wabah corona.

"Kami tidak akan mengirim delegasi untuk menghadiri pertemuan dan sidang atau konferensi organisasi parlemen regional maupun internasional," ujar Puan saat rapat paripurna pembukaan masa persidangan ketiga di gedung Nusantara, DPR, Jakarta, Senin (30/3).

"Juga termasuk untuk meniadakan kegiatan Kunker Spesifik (kecuali urgent dan atas izin Pimpinan DPR, meniadakan kegiatan seminar, FGD dan konsiyering baik dalam ataupun luar kota," sambung Puan.

Menurut Puan, hal tersebut sangat penting karena virus corona dapat mengenai siapa saja dan sementara ini belum tersedia pengobatan yang efektif terhadap penyakit tersebut.

Ia menilai, anggota DPR dapat ikut memperkuat dan mendukung Pemerintah Daerah, di dapilnya masing-masing dalam menjalan-



Ketua DPR RI, Puan Maharani

kan kebijakan penanganan dampak virus corona agar terintegrasi dan terpadu dengan kebijakan nasional.

"Yang terhormat anggota DPR, melalui jaringan di dapilnya masing-masing, ikut memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan virus corona," ujar Puan.

Puan juga mengatakan, DPR akan membantu penanganan pandemi Corona dari sisi anggaran, legislasi, dan pengawasan. Salah satunya dengan mengatur ulang APBN menyesuaikan kondisi saat ini.

Menurut Puan, saat ini APBN sudah tidak sesuai dengan asumsi-asumsi yang direncanakan. Karenanya, dibutuhkan berbagai penyesuaian baik dari sisi penerimaan, belanja, dan pembiayaan yang akan di-fokuskan untuk penanganan pandemi Covid-19.

Ia berharap upaya ini dapat meminimalisir dampak pandemi Covid-19 terhadap aspek sosial ekonomi. Jumlah kasus pasien yang terkonfirmasi positif virus corona Covid-19 di Indonesia terus bertambah. (ins)

UNTUK PENANGANAN CORONA

ANGGARAN DEWAN KOTA BLITAR **DIPANGKAS RP 60 JUTA/ ANGGOTA**

Blitar - Demi mengatasi penyebaran dan dampak dari wabah Virus Corona (Covid-19), sebanyak 25 anggota DPRD Kota Blitar rela dipangkas anggarannya sebesar Rp 1,5 miliar atau Rp 60 juta per orang.

Disampaikan Ketua DPRD Kota Blitar, dr Syahrul Alim jika untuk mengatasi masalah Covid-19 ini dibutuhkan anggaran yang besar, maka jangan hanya anggaran Hari Jadi Kota Blitar Ke-114 saja yang dialihkan. "Dana reses DPRD masa persidangan 2020, bisa digunakan untuk menangani Covid-19 ini," tutur Syahrul, Senin(30/3).

Bahkan ditegaskan Syahrul jangan sampai ada kesan kekurangan anggaran, karena anggaran apa pun bisa digunakan untuk Covid-19. "Supaya pemkot lebih fokus menangani Covid-19, baik peralatan medis maupun kebutuhan lainnya," tegas Ketua DPC PDIP Kota Blitar ini.

Demikian juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Agus Zunaedi yang mengaku bukan hanya anggaran reses yang bisa dialihkan untuk Covid-19, tapi anggaran kunjungan kerja (kunker) juga bisa. "Karena sesuai instruksi presiden, semua kegiatan kunjungan keluar daerah dan mengumpulkan banyak orang jelas tidak bisa dilaksanakan," ujar Agus.

Jadi lebih baik anggaran yang sudah



Ketua DPRD Kota Blitar, dr Syahrul Alim

terlanjur dialokasikan tersebut, digeser saja untuk mengatasi dampak Covid-19. "Terutama dampak bagi perekonomian daerah, yaitu pedagang kecil yang tidak bisa berdagang juga perlu dipikirkan," tandas politisi PPP ini.

Termasuk juga adanya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (silpa) tahun 2019, sebesar sekitar 200 miliar yang bisa digunakan untuk menangani Covid-19 ini pungkas Agus.

Secara terpisah Sekretaris DPRD Kota

Blitar, Eka Atikah ketika dikonfirmasi mengenai nilai anggaran reses dan kunker tahun 2020 ini, mengatakan jumlah totalnya sekitar Rp 1,5 miliar. "Total nilai tersebut, sudah termasuk biaya operasional reses 1 kali masa persidangan," kata Eka.

Ditambahkannya di DPRD Kota Blitar untuk masa persidangan 1 sudah dilaksanakan awal Pebruari 2020 lalu, jadi yang akan dialihkan dana reses untuk berikutnya imbuahnya. (ais)

PENCEGAHAN CORONA DI JATIM

LAKUKAN DISINFEKSI DI 8 PINTU TOL PASURUAN HINGGA SURAMADU

Surabaya- Makin mewabahnya corona di Jawa Timur mendorong beberapa daerah memperketat pergerakan masyarakat dengan melakukan disinfeksi (sterilisasi). Di Pasuruan misalnya, petugas bersiap di 8 pintu tol.

"Hari ini kita lakukan disinfeksi di semua exit tol yang ada di Pasuruan," kata Wakil Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Pasuruan, Tectona Jati, Senin (30/3).

Pintu tol yang dimaksud yakni pintu tol Grati, Bangil, Rembang, Beji, Gempol, Pandaan, dan Purwodadi. Ketujuh pintu tol ini berada di wilayah Kabupaten Pasuruan serta 1 pintu tol di wilayah Kota Pasuruan. Petugas menyiagakan ambulan untuk membawa pengemudi maupun penumpang yang dicurigai terjangkit Covid-19 ke rumah sakit.

"Penyemprotan cairan disinfektan dilakukan ke semua kendaraan dan penumpangnya. Cairan untuk kendaraan dan manusia beda, jadi aman," terang Tecto.

Hal serupa dilakukan di pintu masuk kawasan Madura. Langkah ini secara khusus dilakukan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Jatim bersama jajaran Forkopimda Jatim sebagai upaya berlapis pencegahan penyebaran virus corona di kawasan Madura.

"Mulai Minggu (29/3) sore, sudah dioperasikan drive thru disinfektan di pintu masuk Jembatan Suramadu dari yang keluar Madura. Sementara cek dan penyemprotan disinfektan kendaraan ke arah

Madura dari Surabaya telah dilakukan sejak Kamis (26/3) dan drive thru dimulai Senin (30/03). Langkah ini kita ambil supaya masyarakat mendapatkan pemeriksaan secara berlapis, selain yang dilakukan di terminal kabupaten sebagai antisipasi pencegahan penyebaran Covid-19," kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat meninjau pemasangan Drive Thru Disinfektan di Bangkalan, Madura.

Tak hanya di Bangkalan, di pintu masuk Jembatan Suramadu di Kota Surabaya juga dilakukan penyemprotan disinfektan drive thru. Termasuk kendaraan angkutan umum yang membawa rombongan juga dilakukan penyemprotan disinfektan dan seluruh penumpang diminta turun di cek suhu tubuh, serta disemprot disinfektan di baju atau tas bawaan mereka.

Lebih lanjut Gubernur perempuan pertama Jatim ini mengimbau ke masyarakat Madura yang tengah merantau di luar Madura, khususnya yang dari Jakarta, Jateng, Jabar maupun daerah terjangkit lain, agar menunda mudik lebaran Idul Fitri.

Tak ketinggalan, Pemkab Magetan juga memperketat pengawasan lalu lintas orang yang masuk ke wilayahnya. Ini menyusul 9 warga yang terkonfirmasi positif Virus Corona (Covid-19).

Bupati Magetan Suprawoto mengatakan, pengawasan secara ketat itu dilakukan dengan pemeriksaan suhu tubuh setiap orang yang masuk ke Magetan. Se-



Pengguna jalan tol di Pasuruan disemprot disinfektan untuk mengantisipasi wabah corona

pemeriksaan suhu tubuh. Juga penyemprotan disinfektan. Ada enam titik posko pemantauan," kata Bupati Supraworo, Senin (30/3).

Selain itu, lanjut dia, untuk mencegah penyebaran Covid-19, Pemkab Magetan juga melakukan pembatasan jam buka toko di wilayah zona merah. Zona merah ditentukan setelah dinas kesehatan melakukan tracking 9 pasien positif Corona tersebut.

Untuk toko, Pemkab Magetan memberikan waktu buka hingga pukul 11.00 Wib. Pemilik toko juga diwajibkan menyediakan hand sanitiser serta tempat cuci tangan dengan sabun di setiap tokonya.

"Kalau buka harus menerapkan protokol kesehatan dengan jaga jarak dan menyediakan tempat cuci tangan," tegasnya. (ist,ins)

JOMBANG TAK KARANTINA WILAYAH, MADIUN LARANG KUNKER

Jombang - Meski Jombang sudah ditetapkan sebagai zona merah Covid-19 (virus corona), namun Bupati Mundjidah menegaskan bahwa tidak ada kebijakan karantina wilayah.

"Kita tidak melakukan karantina wilayah, karena kebijakan tersebut merupakan wewenang pemerintah pusat," ujar Bupati Jombang Mundjidah Wahab saat jumpa pers terkait Covid-19 di kantor Pemkab setempat, Senin (30/3).

Bupati hanya memastikan bahwa satu pasien positif corona asal Jombang tersebut menjalani isolasi mandiri di rumah. Kepada masyarakat, Mundjidah kembali mengimbau agar tetap mematuhi anjuran pemerintah agar menjaga jarak, berdiam di rumah, serta mencuci tangan menggunakan sabun.

Sementara itu, lanjut bupati, selain satu orang positif corona, jumlah PDP (pasien dalam pengawasan) juga mengalami peningkatan, yakni sebanyak 6 orang. Kemudian 1.222 berstatus ODR (orang dengan risiko) dan 138 ODP (orang dalam pan-

tauan).

Di sisi lain, Bupati Jombang Mundjidah Wahab dan Wabup Sumrambah. Atas nama kemanusiaan dua pejabat tersebut menyerahkan gajinya selama enam bulan.

Gaji tersebut diserahkan kepada Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Jombang. Penyerahan secara simbolis kepada Ketua Baznas Didin Achmad Sholahudin dilakukan di kantor Pemkab Jombang, Senin (30/3).

"Hari ini gaji saya dan Pak Wabup saya serahkan ke Baznas untuk masyarakat yang terdampak Covid-19. Gaji mulai bulan ini hingga enam bulan ke depan," kata Bupati Mundjidah.

Berapa besaran gaji bupati satu bulan? Mundjidah mengatakan, gajinya per bulan pada kisaran Rp 4 juta. "Gaji saya sekitar Rp 4 juta. Detailnya, saya lihat struknya," katanya.

Madiun Larang OPD Kunker

Sementara, Pemkot Madiun dengan tegas tidak memperbolehkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk



Santri Ponpes Bahrul Ulum Jombang disemprot disinfektan sebelum dipulangkan

melakukan kunjungan kerja. Menurut Walikota Madii hal ini berlaku sampai situasi kondusif.

Tak hanya itu, Walikota Madii juga tidak menerima tamu dari luar. "Tidak boleh. Semua OPD yang kunker di luar kita cancel tidak ada. terima tamu dari luar juga kita stop tidak ada. Jadi semua opd off," tegasnya, Senin (30/3).

Sebagai gantinya, ASN di Pemkot Madiun bekerja dengan memanfaatkan fasilitas IT. Sehingga, setiap proyek tetap berlanjut sesuai arahan protokol dan kerjasama antar instansi tetap terhubung dengan baik.

Walikota Madii mencontohkan proyek pembangunan trotoar taman kota. Meski dirinya tak langsung terjun ke lapangan untuk memantau situasi kondisi proyek, ia bisa mengontrol lewat kiriman foto via WhatsApp. (ist,sur)

BAWASLU TELAH PERIKSA **475 DUGAAN** PELANGGARAN PILKADA 2020

Jakarta – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terus bekerja memeriksa dugaan pelanggaran Pilkada Serentak 2020 meskipun ada pandemi virus corona. Hingga 27 Maret 2020 terdapat 475 dugaan pelanggaran Pilkada 2020.

Dikutip Senin (30/3), dugaan pelanggaran yang berupa temuan sebanyak 491 kasus, laporan dari masyarakat sebanyak 84 kasus. Namun dari keduanya, setelah dilakukan kajian awal, sebanyak 103 kasus dinyatakan bukan merupakan termasuk pelanggaran.

Berdasarkan jenis pelanggaran, terdapat empat jenis. Rinciannya, dugaan pelanggaran administrasi sebanyak 139 kasus, pidana sebanyak dua kasus, kode etik 16 kasus, dan dugaan pelanggaran hukum lainnya sebanyak 318 kasus.

Tentang dugaan pelanggaran administrasi, beberapa perbuatan pelanggaran yang paling dilakukan baik peserta pilkada, penyelenggara maupun masyarakat, di antaranya: pengumuman seleksi penyelenggara Ad hoc (sementara) seperti calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak memenuhi syarat karena berasal dari partai politik. Kemudian calon anggota PPK dan PPS telah dua periode menjabat, pelayanan KPU dalam proses pendaftaran penyelenggara ad hoc, adanya survei ter-

hadap bakal calon, serta pemalsuan dokumen syarat pendaftaran.

Dalam kaitan pelanggaran pidana sebanyak dua kasus, pertama akibat menghilangkan hak seseorang menjadi pasangan calon. Hal ini melanggar aturan Pasal 180 Ayat (1) UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. Yang kedua terkait memalsukan daftar dukungan dari jalur perseorangan sesuai aturan Pasal 185 A Ayat (1) UU Pilkada 10/2016.

Selanjutnya, tren pelanggaran kode etik penyelenggara pilkada bentuknya seperti Panitia Pengawas Pemilihan tingkat Kecamatan (Panwascam) menjadi pengurus parpol, Panwascam memberikan dukungan kepada bakal paslon, KPU Kabupaten/Kota meloloskan PPS yang menjadi pengurus parpol, KPU Kabupaten/Kota tak profesional dalam pembentukan PPK dan PPS.

Terakhir pelanggaran hukum lainnya didominasi oleh pelanggaran Aparatur Sipil Negara (ASN). Beberapa di antaranya seperti ASN memberikan dukungan melalui media sosial, ASN melakukan pendekatan atau mendaftarkan diri pada salah satu bakal paslon, ASN menyosialisasikan bakal paslon melalui alat peraga kampanye (APK), dan ASN yang menghadiri kegiatan silaturahmi yang dianggap menguntungkan bakal paslon. (ant)



DUGAAN PELANGGARAN PILKADA 2020

(Data Bawaslu Per 27 Maret 2020)

Total dugaan pelanggaran :

475 Kasus

BERDASARKAN SUMBER INFORMASI

Temuan :

491 kasus

Laporan masyarakat :

84 kasus

Bukan merupakan termasuk pelanggaran :

103 kasus

BERDASARKAN JENIS PELANGGARAN

Pelanggaran administrasi :

139 kasus

Pidana :

2 kasus

Kode etik :

16 kasus

Pelanggaran hukum lainnya :

318 kasus

DISETUJUI DPR, SYARAT PERPU TUNDA PILKADA 2020 **SUDAH TERPENUHI**

Jakarta - Komisi II DPR bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara terbatas, Senin (30/3). Salah satu agendanya membahas penundaan Pilkada 2020 yang disetujui DPR hingga dibuat keputusan selanjutnya.

Terpisah, Ahli Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Ferry Amsari mengatakan tiga syarat yang diatur keputusan Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu untuk menunda Pilkada 2020 sudah memungkinkan. Ini terkait dengan mewabahnya virus corona di masyarakat.

Ferry mengatakan KPU punya tanggung jawab untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang untuk menyelenggarakan Pilkada pada September 2020. "Namun dalam situasi ketidakpastian ini bagaimana? Walau situasi seperti ini harus dijalankan juga. Bagaimanaantisipasi itu? Di Undang-Undang ada mekanisme untuk antisipasinya, salah satunya Perpu," kata Ferry.

Ferry mengatakan Perpu diatur dalam

Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan "Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam hal ihwal kegentingan memaksa". Frasa kegentingan memaksa ini, kata Ferry, sudah diatur dalam Putusan MK Nomor 138/PUU/VIII/2009, di mana putusan ini mensyaratkan tiga hal.

Pertama, kebutuhan mendesak persoalan hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang. Pilkada secara spesifik diatur dalam Undang-Undang untuk diselenggarakan pada September 2020. Namun, kata Ferry, hal itu hampir tidak bisa dilaksanakan karena faktor wabah virus corona

Kedua, adanya kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang namun tidak memadai. Undang-Undang Pilkada yang seharusnya menjadi dasar hukum, kata Ferry, tidak menyediakan alternatif proses penyelenggaraan Pilkada apabila terjadi bencana dengan waktu yang tidak pasti. Seperti virus corona yang ia sebut sejauh ini belum dapat diketahui secara pasti kapan akan mereda.

Ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak bisa diatasi dengan prosedur biasa, yakni dengan membuat Undang-Undang



Ahli Hukum Tata Negara dari Universitas, Andalas Ferry Amsari

di parlemen. Menurut Ferry karena selain akan memakan waktu banyak, rapat-rapat di DPR pun mensyaratkan berkumpulnya banyak orang dalam satu ruangan, yang saat ini bertentangan dengan prinsip physical distancing yang dikeluarkan WHO.

"Jadi tiga syarat itu sebenarnya sudah memungkinkan untuk pemerintah dalam hal ini presiden untuk menyatakan telah ada hal-ihwal kegentingan memaksa sehingga diperlukan Perpu untuk menyelamatkan proses penyelenggaraan Pilkada kita," tuturnya. (ist)

A photograph of Jack Ma, the founder of Alibaba, speaking at a podium. He is wearing a dark blue zip-up jacket and is pointing his right index finger towards the left. The background is dark with several bright, circular stage lights in shades of blue and white.

Jack Ma
Miliki Akun **Twitter**
Postingan Pertama
Soal **Corona**

Pendiri Alibaba Group Holding Ltd. Jack Ma belum lama ini bergabung dengan Twitter. CEO Twitter Jack Dorsey pun menyambut kedatangan Jack Ma di platformnya.

Dalam tweet pertamanya, Ma memposting foto-foto pesawat China Eastern Airlines dengan kotak-kotak test kit virus corona dan masker yang dijadwalkan akan disumbangkan ke AS dari Shanghai.

"Semua yang terbaik untuk teman-teman kita di Amerika," tulisnya dalam tweet tersebut.

Dalam profilnya, ia menggambarkan dirinya sebagai "guru, dermawan, wirausaha". Cuitan tersebut sudah meraih lebih dari 477 ribu like dan 83 ribu retweet.

Lewat cuitan itu pula Chief Executive Officer Twitter Jack Dorsey me-retweet post Jack Ma. Menurut Bloomberg Billionaires Index, Jack Ma sekarang adalah orang terkaya di Asia.

Lalu, beberapa jam kemudian, Jack Ma tweeted lagi mengumumkan sumbangan test kit, masker wajah, baju

pelindung penggunaan medis dan pelindung wajah untuk setiap negara di Afrika.

Yayasan Jack Ma dan Yayasan Alibaba pada hari Jumat mengumumkan bahwa mereka telah menyiapkan 500.000 alat uji dan 1 juta masker untuk dikirim ke AS, menambah yang sudah disumbangkan ke negara-negara yang terkena dampak lainnya termasuk Jepang, Korea Selatan, Italia, Iran dan Spanyol.

Jack Ma sebelumnya mengumumkan di akun Weibo-nya bahwa ia menyumbangkan 100 juta yuan (14,5 juta dolar AS) melalui yayasannya untuk mendukung upaya penelitian medis dan pencegahan penyakit.

Dikutip dari The Verge, ini bukanlah kali pertama Jack Ma mendonasi untuk isu global yang disebabkan COVID-19. Ia sudah melimpahkan 2 juta masker pencegahan kepada negara Eropa.

Pertama adalah sumbangan 500 ribu masker, test kit, dan penyedia pengobatan kepada Italia yang diserang habis-habisan oleh virus tersebut.

"Melihat pengalaman negara saya sendiri, pengujian yang cepat dan

akurat dan peralatan perlindungan pribadi yang memadai bagi para profesional medis merupakan cara paling efektif dalam mencegah penyebaran virus," kata Jack Ma dikutip dari laman CNN, (Minggu, 15/3/2020).

Jack Ma melanjutkan bahwa kita tidak bisa mengalahkan virus ini kalau tidak menyingkirkan batasan-batasan yang ada, sebaliknya justru Ma berharap setiap negara bisa saling berbagi ilmu dan hal-hal yang diketahui soal virus ini.

Ia juga berharap satu juta masker dan 500 ribu alat uji COVID-19 ini dapat membantu AS melawan pandemi.

Sumbangan Jack Ma turun beberapa jam setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan keadaan darurat nasional untuk membebaskan sekira USD50 miliar atau RP732 triliun untuk mengatasi COVID-19.

Tak hanya untuk AS, sebelumnya Jack Ma juga menyumbangkan satu juta masker ke Jepang pada 2 Maret 2020 dan Iran pada 6 Maret 2020. Ia juga mendonasikan 1,8 juta masker dan 100.000 alat uji ke Eropa.





SAAT KERJA DI RUMAH,

JANGAN LUPA OLAHRAGA WALAU SEBENTAR

Menghadapi bahaya virus corona yang terus menyebar dan menular, pemerintah Indonesia telah memberikan kebijakan untuk meliburkan sekolah serta anjuran *work from home*.

Namun, walaupun kita telah dianjurkan untuk mengurangi aktivitas di ruang publik dan disarankan untuk melanjutkan kegiatan di rumah, jangan sampai melewatkan waktu olahraga, ya.

Tak ada alasan untuk berolahraga, karena kita bisa melakukannya dengan berbagai cara mudah, seperti yang dilansir dari laman Women's Health Magazine berikut.

1. Bersiap

Meskipun di rumah, tak ada salahnya mengenakan sport bra, legging olahraga, dan sepatu kesayangan kita.

Jangan lupa pasang lagu favorit kita, dan lakukan pemanasan, seperti yang dijelaskan oleh Michelle Lovitt, psikolog dan celebrity trainer dari Los Angeles.

2. Lakukan dalam 10 Menit

Selalu lakukan setidaknya 10 menit setiap harinya, misalnya dengan melakukan push up, squat, atau lainnya.

3. Streaming

Ada berbagai website streaming baik berbayar maupun tidak yang bisa kita tonton di rumah, misalnya DanceBody, atau dari YouTube seperti BeFit, BodyRock, dan FitnessBlender.

4. Sediakan Sepasang Dumbbell

Piranti wajib untuk melakukan olahraga di rumah adalah sepasang dumbbell.

Dumbbell bisa membantu olahraga kita semakin efektif dalam menurunkan berat badan atau membentuk tubuh.

5. Lompat Tali

Tak hanya sebagai permainan anak-anak, lompat tali juga merupakan salah satu gerakan aerobik yang bisa membantu kita membakar kalori.

Tergantung pada berat badan dan massa otot, kita bisa membakar kalori sebanyak 150 hingga 200 kalori setiap 15 menit.

6. Letakkan Alat Olahraga di Dekat TV

Letakkan dumbbell, matras, resistance bands, atau peralatan olahraga lainnya di dekat TV kita.

Dengan begitu, kita selalu ingat untuk berolahraga dan bisa melakukannya sembari menonton televisi, seperti yang dijelaskan oleh Kristin McGee dari Ney York.

7. Gunakan Barang Lama

Tak perlu membeli berbagai peralatan olahraga yang baru, kita bisa memanfaatkan barang-barang yang sudah ada. Misalnya, hula-hoop atau alat yang tersedia di rumah kita.

Nah, tak ada lagi alasan untuk melewatkan waktu olahraga ketika kita sedang banyak menghabiskan waktu di rumah, ya! (Ist)



WHO RILIS 10 INFO HOAKS PENCEGAHAN VIRUS CORONA



Informasi palsu (hoax) dan disinformasi soal Covid-19 semakin menjamur di media sosial maupun layanan pesan instan, seperti WhatsApp. Kejadian ini pun membuat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) turun tangan menangkal hoaks.

WHO merilis daftar informasi keliru soal Covid-19 yang telah beredar luas.

Di Indonesia sendiri sudah ada tim pengais konten negatif Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang bertugas untuk menjangkir hoaks soal corona, apalagi virus ini telah menjangkiti ratusan orang.

Berikut penjelasan beberapa hoaks yang beredar terkait virus corona yang dirilis WHO:

1. Mandi Air Panas Tidak Dapat Mencegah Covid-19

Menurut penjelasan WHO, mandi dengan air panas malah dapat membahayakan tubuh karena kulit bisa terbakar bukan mencegah penyakit Covid-19.

Cara terbaik untuk melindungi diri dari virus corona dengan sering mencuci tangan di bawah air mengalir.

2. Virus Corona Tidak Ditularkan Lewat Gigitan Nyamuk

WHO menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada informasi atau bukti yang menunjukkan bahwa virus corona dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk.

Virus corona baru ini menyebar melalui

air liur orang yang terinfeksi saat batuk atau bersin. Hindari kontak langsung dengan seseorang yang mengidap flu.

3. Virus Corona Tidak Bisa Mati Lewat Pengering Tangan

Beredar informasi bahwa mesin pengering tangan (hand dryers) dapat membunuh virus corona. WHO menegaskan informasi ini tidak benar.

4. Lampu Ultraviolet Tidak Bisa Bunuh Virus Corona SARS-Cov-2

WHO menepis informasi soal lampu ultraviolet (UV) dapat membunuh virus corona. Lampu UV malah menyebabkan iritasi pada kulit karena radiasinya yang cukup kuat.

5. Thermal Scanner Tidak Dapat Mendeteksi Orang yang Terinfeksi Covid-19

Menurut WHO, fungsi thermal scanner hanya untuk mendeteksi suhu tubuh seseorang tetapi tidak dapat mendeteksi orang yang terinfeksi Covid-19. Sebab, virus corona mulai menjangkiti penderita sekitar 2 sampai 10 hari.

6. Menyemprotkan Alkohol ke Seluruh Badan Tidak Dapat Membunuh Virus Corona Baru

WHO menegaskan bahwa menyemprotkan alkohol atau klorin ke seluruh tubuh tidak dapat membunuh virus corona. Malah dapat membahayakan selaput lendir, misalnya mata dan mulut.

7. Vaksin Pneumonia Tidak Dapat Melindungi Diri dari Virus Corona SARS-Cov-2

WHO mengatakan melakukan vaksin pneumonia tidak memberikan perlindungan terhadap virus corona baru.

Menurut WHO, virus ini terbilang sangat baru dan berbeda sehingga membutuhkan vaksin tersendiri. Saat ini, sejumlah peneliti dari berbagai negara masih merampungkan vaksin Covid-19.

8. Membilas Hidung dengan Cairan Saline Tidak Bisa Cegah Virus Corona-19

Menurut WHO, belum ada bukti bahwa mencuci hidung dengan cairan saline bahkan air garam secara teratur dapat melindungi diri dari virus corona.

9. Makan Bawang Putih Tak Dapat Membantu Cegah Covid-19

WHO menepis informasi yang menyebutkan bahwa makan bawang putih dapat mencegah diri dari penyakit COVID-19. Meskipun bawang putih tergolong bumbu sehat yang memiliki sifat antimikroba.

10. Orang dengan Segala Usia Bisa Kena Covid-19

Menurut WHO, Covid-19 bisa menyerang siapa saja namun jika ada orang yang lebih tua memiliki penyakit bawaan seperti asma, diabetes bahkan jantung, efek infeksi Covid-19 bakal lebih parah. (Ist)

MANDI DENGAN AIR PANAS TERNYATA BAHAYAKAN KULIT



Salah satu cara melepas lelah setelah beraktivitas seharian adalah dengan air panas. Tapi ternyata, sering mandi dengan air panas juga bisa memberikan efek negatif bagi kesehatan kulit. Simak yuk!

Mandi dengan air panas atau hangat adalah salah satu cara menyegarkan tubuh dan menghilangkan capek-capek. Orang lebih suka mandi air panas karena otot akan terasa rileks, tetapi mandi air panas bisa menghilangkan minyak alami dari kulit Anda pada saat yang bersamaan.

Air panas juga bisa menyebabkan kulit menjadi gatal dan kering. Melansir thehealthsite, Dermatolog Sejal Shah mengatakan, ada beberapa hal yang seharusnya tidak dilakukan saat mandi. Jika kamu tinggal di tempat yang dingin, pastikan bahwa suhu airnya hangat dan tidak panas.

"Ya, terlalu sering mandi air panas apalagi airnya terlalu panas pada beberapa orang membuat kulit menjadi kering. Penyebabnya karena pada kondisi panas, terjadi evaporasi dan menguapnya cairan di sekitar kulit," jelas Head of Medical Kalbe Nutritionals dr Muliaman Mansyur.

Selain itu, kamu juga tidak boleh mandi terlalu lama. Mungkin Anda menghabiskan

waktu mencapai 30 menit di kamar mandi, baik di bawah pancuran atau berendam. Itu terlalu lama. Kulit yang terkena siraman air dapat mengupas minyak alami dan lipid dari kulit Anda, yang membantu memerangkap air untuk menjaga kelembapan kulit Anda. Jadi cobalah mandi tidak lebih dari 10 menit di kamar mandi.

Terlebih lagi, lanjut dr Muliaman, kulit dan rambut tentunya akan menjadi kering saat musim hujan. Mandi dengan air hangat akan membuatnya semakin kering.

"Pada kondisi hujan yang terus menerus tentu akan meningkatkan kelembapan udara yang tinggi dan memang membuat kulit akan jadi kering. Sebenarnya pada kondisi udara yang dingin tubuh melalui mekanismenya untuk mengeluarkan sekresi kelenjar minyak, tapi pada beberapa orang ini tidak terjadi karena sesuatu hal kelenjar minyaknya tidak diproduksi dengan baik. Kondisi ini bisa berujung pada masalah kulit dan rambut," jelasnya.

Karenanya, pada musim dingin sebaiknya mandi dengan menggunakan air bersuhu suam-suam kuku. Agar kulit tetap lembab, dianjurkan memakai lotion.

"Kelembapan kulit harus tetap dijaga dengan baik secara lokal, seperti pemberian body lotion dan juga pemberian nutrisi yang bagus. Karena kulit yang kering mengakibatkan kulit menjadi keriput," ucap dr Muliaman.

Nah setelah tahu, pastikan untuk tidak sering lagi mandi dengan menggunakan air panas, terutama saat musim hujan. Untuk mendapatkan kulit yang sehat tentunya diperlukan perawatan yang tepat.

Selain itu, bantu perawatan kulit agar tetap sehat dengan penggunaan skin care serta makanan dan minuman sehat yang menambah kelembapan kulit. Minuman kaya kolagen dan antioksidan untuk menjaga kulit agar tetap lembap serta sehat. (ist)

Kala Darurat *(dari hal 1)*

Wabah corona di Indonesia belum juga terbandung. Juru Bicara Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto mengatakan, update data Corona di Indonesia pada Senin, 30 Maret pukul 12.00 WIB ada penambahan kasus positif 129 orang.

Artinya secara total sebanyak 1.414 kasus positif corona terkonfirmasi. Penambahan kasus sembuh 11 orang, total 75 orang dan ada 8 kematian baru, total 122 orang. Daerah sebarannya pun tiap hari terus bertambah. Bila sebelumnya ada di 30 provinsi, kini sudah menyebar ke 31 provinsi.

Melihat hal itu, melalui Jubirnya, Fadjoel Rahman, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar. "Menetapkan tahapan baru perang melawan COVID-19 yaitu: Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan Kekarantinaan Kesehatan," tulis Fadjoel dalam Twitternya, Senin (30/3).

Ia menjelaskan, jika kondisi wabah virus corona memburuk Jokowi bisa memberlakukan darurat sipil. "Hanya jika keadaan sangat memburuk dapat menuju Darurat Sipil," kata Fadjoel.

Dalam Perppu tersebut dijelaskan 'keadaan darurat sipil' adalah keadaan bahaya yang ditetapkan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang untuk seluruh atau sebagian wilayah negara.

Fadjoel mengatakan, saat ini pemerintah masih terus mengupayakan kebijakan pembatasan sosial berskala besar dan physical distancing (menjaga jarak aman). Menurut dia, Presiden Jokowi telah menginstruksikan kebijakan ini dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif agar memutus mata rantai persebaran virus korona atau Covid-19.

"Dalam menjalankan Pembatasan Sosial Berskala Besar, pemerintah akan mengedepankan pendekatan persuasif melalui kolaborasi Kementerian Kesehatan, Gugus Tugas Covid-19, Kementerian Perhubungan, Polri/TNI, Pemda dan K/L terkait," kata dia.

Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui siaran konferensi video, Senin (30/3) meminta apotek dan toko kebutuhan pokok tetap buka apabila nantinya pemerintah menerapkan kebijakan

pembatasan sosial ekstrem yang disertai darurat sipil.

"Saya juga minta dan pastikan bahwa apotek dan toko-toko penyuplai kebutuhan pokok bisa tetap buka untuk melayani kebutuhan warga dengan tetap menerapkan protokol jaga jarak yang ketat," katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebutkan, kebijakan pembatasan sosial untuk mencegah penyebaran virus corona Covid-19 perlu dilakukan dengan skala lebih besar. Ia juga meminta pembatasan sosial yang dikenal dengan sebutan physical distancing ini didampingi kebijakan darurat sipil. "Saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing, dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif lagi," katanya.

"Sehingga, tadi sudah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil," tuturnya. Ia pun meminta jajarannya segera menyiapkan payung hukum untuk menjalankan pembatasan sosial skala besar ini sebagai pegangan bagi pemerintah daerah.

"Dalam menjalankan kebijakan pembatasan sosial berskala besar, saya minta agar segera disiapkan aturan pelaksanaan yang jelas sebagai panduan provinsi kabupaten dan kota sehingga mereka bisa bekerja," ucapnya.

Banjir Penolakan

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak pemerintah tetap mengacu pada UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan sebagai payung hukum dalam mengatasi pandemi Corona. Hal ini didasarkan pada isu COVID-19 yang merupakan kondisi yang disebabkan oleh bencana penyakit. Sedangkan Darurat Sipil karena faktor keamanan dan pertahanan.

"Pemerintah belum saatnya menerapkan keadaan darurat sipil atau darurat militer," kata anggota koalisi, Erwin Natosmal Oemar.

Koalisi terdiri atas ELSAM, Imparsial, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Pers, ICW, PBHI, PILNET Indonesia, dan KontraS. "Presiden harus mengeluarkan Keppres terkait penetapan status bencana nasional yang akan menjadi payung hukum penerapan kebijakan

pembatasan sosial. Keppres tersebut termasuk mengatur struktur komando pengendalian (kodal) bencana yang lebih jelas yang dipimpin oleh Presiden sendiri," ujar Erwin.

Dalam Keppres tersebut, juga harus memasukkan dan menanggulangi kerugian terhadap pihak-pihak yang terdampak dari kebijakan tersebut, baik ekonomi, sosial, maupun kesehatan. "Demi efektivitas penanganan kekarantinaan kesehatan pemerintah perlu segera mengeluarkan peraturan pelaksanaannya (PP) yang sesuai dengan prinsip-prinsip HAM, terutama dalam aspek pembatasan," cetus Erwin.

Hal senada diungkapkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). "Yang kita butuhkan darurat kesehatan nasional," kata komisioner Komnas HAM, Choirul Anam.

Darurat kesehatan nasional bertujuan untuk memastikan kondisi kesehatan masyarakat yang terancam oleh virus Corona. Darurat kesehatan nasional juga memuat kondisi sarana dan prasarana yang belum maksimal. Keadaan darurat kesehatan nasional berbeda tujuan dengan darurat sipil.

"Darurat sipil tujuannya tertib sipil yang biasanya untuk memastikan roda pemerintahan berjalan dan tertib sipil. Dari perspektif tujuan saja berbeda jauh," tutur Choirul.

Sebelumnya, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Letnan Jenderal TNI Doni Monardo juga mengatkan pemerintah menegaskan tidak akan ragu mengambil tindakan hukum. Apabila masih ada masyarakat yang abai terhadap keputusan pemerintah menerapkan darurat kebijakan sipil.

"Peningkatan disiplin ini penting. Mungkin bisa diimbangi dengan penegakan hukum bagi mereka yang tak disiplin," kata Doni.

Doni menjelaskan, pemerintah selama ini telah berulang kali memberikan imbauan kepada masyarakat untuk melakukan aktivitas di rumah, maupun menjaga jarak satu sama lain (physical distancing). Namun, hingga kini pemerintah masih mendapati sejumlah masyarakat yang tidak mengikuti imbauan pemerintah. Langkah penegakan hukum, kata Doni, pun nantinya tidak diambil begitu saja melainkan mempertimbangkan faktor lain. (ist)

PNS DILARANG MUDIK, 'NGEYEL' BISA DIPECAT!



Menpan-RB Tjahjo Kumolo

Jakarta - Pemerintah melarang pegawai negeri sipil (PNS) atau ASN untuk melakukan mudik Lebaran.

Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020.

Surat edaran tersebut mengatur tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19. Surat itu ditandatangani Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo.

"Untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran, serta mengurangi resiko Covid-19 yang disebabkan oleh mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya di Indonesia, agar Aparatur Sipil Negara dan keluarganya tidak melakukan kegiatan berpergian ke luar daerah dan atau kegiatan mudik lainnya selama masa berlakunya status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona," bunyi poin dua dari SE no. 36/2020, dikutip Senin (30/3).

Lebih lanjut, dalam video conference yang dilakukan Kementerian PAN-RB dan BKN hari ini, Tjahjo meminta seluruh PNS bisa berpartisipasi untuk menekan penyebaran corona. Salah satunya dengan cara mengingatkan lingkungannya untuk tidak mudik dan melakukan social distancing.

"ASN saya mohon komit dengan anjuran Presiden, dan kita ikuti perkembangan Gugus Tugas BNPB untuk lakukan tugas keseharian. Lalu mengingatkan masyarakat tidak mudik dan jaga jarak

yang aman," kata Tjahjo.

Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Dwi Wahyu Atmaji mengatakan bagi yang nekat melakukan mudik ada sanksi menanti. Dia menjelaskan sanksinya berupa hukuman disiplin pegawai yang tercantum dalam PP 53 tahun 2010.

Mengutip PP 53 tahun 2010 hukuman disiplin dibagi menjadi tiga. Hukuman ringan, sedang, hingga berat. Mulai dari yang ringan, PNS bisa mendapatkan teguran lisan dan tulisan, ataupun pernyataan tidak puas dari atasan.

Hukuman yang sedang berupa penundaan pangkat atau penundaan kenaikan gaji selama setahun. Ada juga penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama setahun.

Sementara itu, hukuman terberat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, dimutasi saat pangkat diturunkan, ataupun pembebasan dari jabatan. Paling berat bisa diberhentikan baik secara hormat dan tidak hormat.

Soal pengawasan, hingga penetapan sanksi, menurut Dwi diberikan kepada masing-masing instansi kementerian ataupun lembaganya. "Diserahkan kepada masing-masing instansi," kata Dwi.

Gelombang mudik mulai terjadi semenjak pemerintah mengimbau masyarakat untuk berkegiatan dari rumah. Tercatat, puluhan ribu sudah warga yang berada di Jabodetabek pulang ke kampung halamannya masing-masing di tengah wabah virus corona.

Demi menekan penyebaran virus

corona, pemerintah berencana melarang warga, khususnya di Jabodetabek sebagai zona merah, untuk mudik ke kampungnya.

Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo, menyatakan keputusan mengenai mudik sudah dibahas dengan beberapa gubernur. Adapun keputusan siapa yang dilarang dan siapa yang boleh mudik, akan diumumkan pada Selasa (31/3).

"Jadi mohon bersabar untuk keputusan ini (mudik -red) akan dikeluarkan Selasa sore. Siapa yang boleh mudik, siapa yang dianjurkan tak mudik, dengan beberapa ketentuan yang nantinya dikeluarkan pemerintah," lanjut Kepala BNPB itu. (ist)

STATISTIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Per Desember 2019



%
ta

4.189.121

jumlah pns per desember 2019

JUMLAH PNS BERDASARKAN JENIS INSTANSI DAN GENDER

1. Instansi Pusat



400.325



553.406

2. Instansi Daerah



1.757.502



1.477.888

2019

Instansi daerah
3.235.390
Instansi Pusat
953.371